

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang bertindak sebagai penyedia jasa keuangan bagi nasabahnya yang umumnya diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah (Wiwoho, 2014). Lembaga keuangan sendiri terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Bank sangat membantu masyarakat terutama dalam hal finansial. Khususnya di Bali, masyarakat Bali mengenal lembaga keuangan bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dimana merupakan lembaga keuangan yang dimiliki desa, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik desa di dalam simpan pinjam. LPD berada di bawah pengawasan Bank Pemerintah Daerah Provinsi Bali. LPD menggunakan dasar-dasar hukum UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, seperti pada pasal 1 angka 12 dan pasal 2 ayat 9. Bank Perkreditan Desa menjadikan UU Nomor 7 tahun 1998 mengenai perbankan sebagai dasar hukum.

Menurut Juniariani dan Saputra (2020) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk membiayai kehidupan masyarakat desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali telah mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa adat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelestarian budaya, dan pelaksanaan upacara

(Pande, *et.all*, 2024). Dilihat dari jumlah LPD yang ada di Bali, masih ada LPD yang terdaftar tidak sehat (Kusuma, *et.al*, 2022). Adanya masalah yang signifikan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) khususnya di Kabupaten Gianyar. Meskipun LPD memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa, berbagai tantangan masih dihadapi. Termasuk disebabkan akibat dari tingkat kecurangan dalam internal LPD yang cukup tinggi, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, dan teknologi informasi yang tidak bijak digunakan, serta sistem informasi akuntansi yang lemah, yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang berkualitas.

Faktanya pelaporan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terjadi merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi. Jika dilihat dari kondisinya, tidak semua LPD di Kabupaten Gianyar beroperasi sesuai kondisi yang diinginkan. Terdapat beberapa LPD yang sudah tidak aktif atau tidak beroperasi lagi, salah satu penyebab menurunnya tingkat keberlangsungan LPD adalah rendahnya kualitas laporan keuangan yang di sajikan (Kumalasari, *et.al*, 2022).

Kasus kecurangan LPD yang terjadi di Kabupaten Gianyar diantaranya, Kasus LPD Belusung, Pejeng, Gianyar, dimana karyawan bagian tabungan melakukan penyelewengan dana dan memanipulasi laporan keuangan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan, dimana terdapat kerugian keuangan sebesar Rp2,6 juta (balipost.com 2022), Kasus lain terjadi di LPD Desa Adat Kedewatan Ubud,

dimana terjadi tindakan korupsi dengan memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD kepada pegawai tanpa jaminan, yang kemudian dicatat sebagai kredit di laporan keuangan. Akibatnya, LPD Kedewatan mengalami kesulitan likuiditas dan kerugian keuangan negara sebesar Rp10,3 miliar (bali.tribunenews.com 2024). Kasus lain terjadi di LPD Tulikup Kelod, Dimana Kasus ini berawal dari tahun 2021 dan sampai saat ini, Kejaksaan Negeri Gianyar melakukan penggeledahan di Kantor LPD Tulikup Kelod pada Agustus 2024 untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan penyelewengan dana. Penyidikan berfokus pada penarikan tabungan besar-besaran akibat dampak COVID-19 dan kredit macet yang menyebabkan krisis likuiditas (balipost.com 2024).

Seiring dengan berkembangnya jaman, terdapat beberapa perubahan reformasi yang sangat memberikan dampak positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini diwujudkan melalui kebijakan pemerintahan daerah yang di atur dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja.

Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Karakteristik yang dimaksud yaitu yang handal, relevan, dapat dibandingkan serta dapat di pahami. Setiap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) wajib menyampaikan

laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi yang digunakan oleh LPD adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada standar akuntansi keuangan umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis yakni mengatur transaksi yang dilakukan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi serta relatif tidak berubah selama beberapa tahun (Krisnawati, 2022). Dengan diterapkannya SAK-ETAP diharapkan LPD mampu menyusun laporan keuangan yang lebih dapat diaudit sehingga berdampak pada hasil laporan keuangan yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun tersebut harus memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat harus berkualitas, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi, keuangan bahkan organisasional tentang pemerintahan. Melalui peningkatan SDM dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan pihak pengelola keuangan lembaga perkreditan desa (LPD) khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good*

governance. Hal ini dibuktikan oleh Hendri dan Erinos (2020), Mariani, dkk. (2023), Andrian, dkk. (2022), Mitjo, dkk. (2023), Yulanda dan Oktalan (2021), Zubaidin, dkk. (2019), Melinda dan Ayu (2021) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Laporan keuangan. Namun, menurut Hasanah dan Siregar (2021), Shanti, dkk. (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan LPD. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal lembaga/instansi. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem berbasis komputer yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dibuktikan oleh Pebriantari dan Andayani (2021), Muniasih (2022) dan Nur, dkk. (2023), Lestari, dkk. (2020), Ghuskairani dan Zulvia (2024), Wati, dkk. (2021), Susanti, dkk. (2024), Gusherinsya dan Samukri (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan LPD. Namun, menurut Dewi (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap Laporan Keuangan LPD. Sedangkan menurut Dewi dan Ernawatiningsih (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan LPD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah menyebutkan SPI merupakan proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk meyakinkan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan Apriada dan Wulandari (2022), Risna (2023), Bale, dkk. (2023), Aziyah dan Yanto (2022), Andriani, dkk. (2019), Mulyati, dkk. (2020), Pramitha, dkk, (2024) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan LPD. Sedangkan menurut Pramesti, dkk. (2021), Rahayu (2023), dan Safitri, dkk. (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan LPD.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sangat bermanfaat dalam berlangsungnya kegiatan suatu lembaga/instansi pemerintahan. Untuk itu setiap LPD berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh Ariningsih (2024), Ishak dan Syam (2020), Sara (2022), Mariani, dkk. (2023), Zubaidin, dkk. (2019), Adnyani (2022), Ariningsih, dkk. (2023), dan Risnawati, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

laporan keuangan LPD. Namun Tariani, dkk. (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan. Namun, menurut Pangestu (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Peran audit juga berpengaruh dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit atau satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam Lembaga Perkreditan Desa. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh LPD, inspektorat melakukan review dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh LPD memiliki keandalan informasi dan sesuai dengan SAP. Bukti empiris mengenai peran internal audit yang dilakukan oleh Miliani (2022), Juliantika (2023), Sugiantari (2023), Astuti dan Supratiningrum (2022), Fibriyani, dkk. (2021), Saputra, dkk. (2022), Irafah, dkk. (2020), Nugroho dan Setyowati (2019), Ciciliawanti, dkk. (2023) yang menemukan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap laporan keuangan LPD. Namun menurut Widhiastuti dan Pradnyawati (2023) menyatakan bahwa peran internal audit tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan LPD.

Berdasarkan uraian fakta diatas serta dengan melihat ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis ingin meneliti kembali mengenai kualitas

laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD desa se-Kabupaten Gianyar?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar?
5. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi

sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD

se-Kabupaten Gianyar

2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD desa se-Kabupaten Gianyar
4. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar
5. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Gianyar

1.4 Manfaat Penelitian

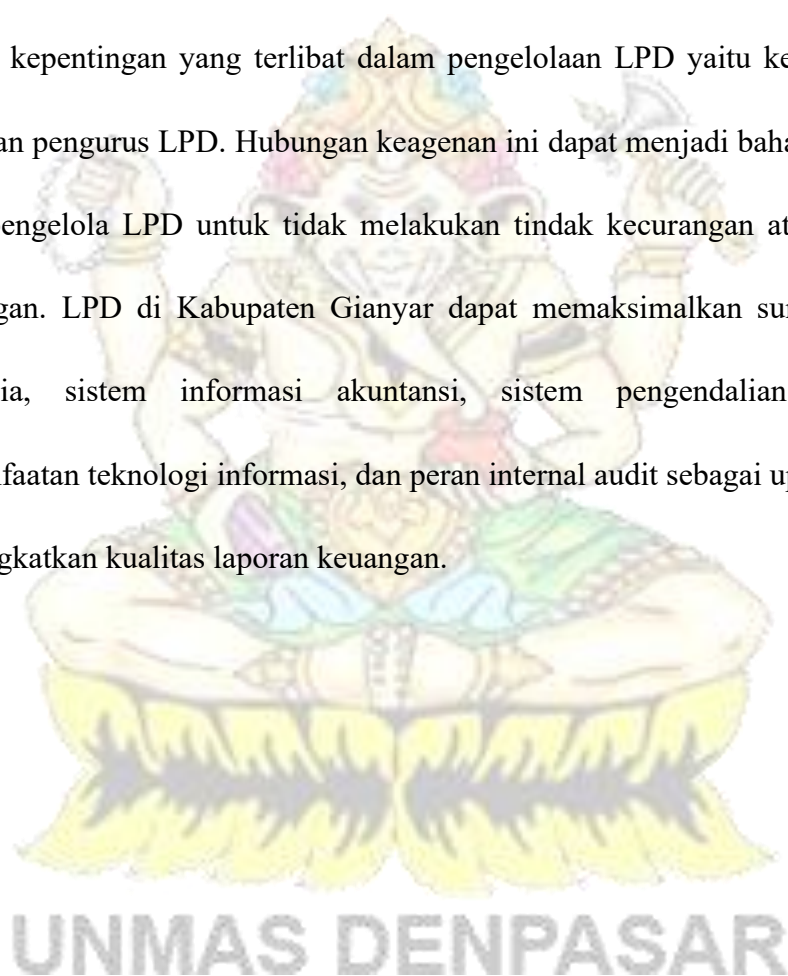
1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris terhadap teori keagenan yaitu hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya asimetri informasi (*information asymetry*), dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, antara manajemen dengan *principle*. Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan yang baik, yang mampu melaporkan laporan keuangan

dengan baik sehingga dapat menciptakan kualitas laporan keuangan LPD yang semakin baik.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara umum kepada pengelola atau pengambil strategi LPD untuk selalu menselaraskan semua kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan LPD yaitu kerama desa adat dan pengurus LPD. Hubungan keagenan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola LPD untuk tidak melakukan tindak kecurangan atas laporan keuangan. LPD di Kabupaten Gianyar dapat memaksimalkan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran internal audit sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*the agency theory*) khususnya menjelaskan mengenai hubungan kontekstual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang atau lebih, sebuah kelompok atau organisasi, yang di mana pihak prinsipal memberikan kekuasaan pada agen untuk membuat sebuah keputusan (Jensen dan Meckling 1976). Teori keagenan bertujuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang muncul saat melakukan kontrak (perikatan) dengan informasi yang tidak lengkap. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak antara *principal* (pemegang saham atau pimpinan perusahaan) dan *agent* (seorang yang menerima perintah, seperti manajemen atau bawahan).

Salah satu masalah utama dalam teori keagenan ini adalah bagaimana agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipalnya. Salah satu hubungan antara teori keagenan dan kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa adalah bagaimana masyarakat sebagai prinsipal percaya bahwa lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dipercaya untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Ini disebabkan oleh asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan penyelewengan kekuasaan atau korupsi oleh aparat

pemerintahan ataupun staf lembaga Perkreditan Desa. Oleh karena itu, lembaga Perkreditan Desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas atau kinerja mereka sebagai mekanisme pengaturan dan keseimbangan untuk mengurangi asimetris informasi dengan cara menyajikan laporan keuangan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, dan akuntabel terhadap pihak prinsipal.

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan hubungan antara sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran internal Audit terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber Daya Manusia memastikan bahwa agen dapat membuat keputusan yang tepat dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, kompetensi sumber daya dapat mengurangi konflik antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemegang saham), dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Informasi mendukung transparansi dan akurasi sebuah pelaporan keuangan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal) dengan menyediakan data yang lebih akurat. Sistem Pengendalian Internal mencegah kecurangan dan kesalahan dalam pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern yang efektif mengurangi resiko tindakan manipulasi yang dilakukan oleh agen sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Internal Audit dapat memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, dan memberikan jaminan tambahan agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Sukamulja (2019:94) menyatakan, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana. (Andari, 2022) .

Sebuah laporan keuangan yang berkualitas artinya harus memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1. Terdapat empat karakteristik persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan yang di hasilkan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka menilai peristiwa masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya.

Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaannya.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan berisi semua fakta secara jujur dan dapat diandalkan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika informasi di dalamnya dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya.

4) Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan disajikan dan disampaikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, penggunaan dianggap memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas dan lingkungan operasional entitas pelaporan, serta adanya keinginan pengguna untuk mempelajari informasi tersebut.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Nurillah (2014) dan Pramudityo (2017). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kompetensi adalah karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

2.1.4 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bodnar dan Hopwood (2012) dalam Mulyani (2012), Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan akan digunakan dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi akan digunakan menentukan keputusan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini baik secara komputerisasi maupun

manual. Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan data transaksi dari semua aktivitas yang dilakukan. Dalam sistem informasi manajemen, semua data organisasi, baik keuangan maupun nonkeuangan, dikelola untuk menjadi informasi bagi seluruh tingkatan manajemen, termasuk manajemen puncak, menengah, dan bawah, untuk membantu mereka membuat keputusan. Sementara itu, informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi berkisar pada informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi organisasi yang lebih bersifat keuangan.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2016: 251) sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen eksekutif dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Karolina, *et. Al*, 2018). Tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah:

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK)
- 5) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat

disebar dan diakses secara global. (Cholik, 2021)

Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan maksimal, maka perlu untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pekerjaannya secara optimal. Dalam penyusunan laporan keuangan, teknologi informasi yang dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan akurasi informasi dan ketepatan waktu. Pemanfaatan teknologi informasi penting dilakukan guna meningkatkan kemampuan Lembaga Perkreditan Desa dalam mengelola keuangan dan menyampaikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Selain itu, pembuatan situs web Lembaga Perkreditan Desa perlu untuk dilakukan, agar memudahkan warga Desa, untuk mengetahui informasi tentang LPD, termasuk program kinerja dan kebijakan baru.

2.1.7 Peran Internal Audit

Setyowati dan Isthika, (2014) menjelaskan, internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. (Pramudityo, 2017)

Auditor internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengendalian

internal perusahaan telah cukup untuk mengurangi terjadinya risiko dan memastikan bahwa kegiatan operasional telah berjalan secara efisien dan efektif serta memastikan tujuan dan sasaran perusahaan telah tercapai. Audit internal yang dilakukan dengan benar akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi manajemen. Objektivitas, keahlian, dan pengetahuan auditor internal yang kompeten akan meningkatkan nilai pengendalian internal perusahaan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Mariani, dkk. (2023) dalam penelitiannya menggunakan 3 variabel independen yaitu pengaruh fungsi badan pengawas, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis regresi linier berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi badan pengawas, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kota Denpasar.

Ferdiana, dkk. (2024) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, kualitas sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, efektivitas pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi, sedangkan fungsi pengawasan badan pengawas dan kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.

Melinda, dkk. (2021) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrua, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrua berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD se-Kecamatan Gianyar.

Andrian, dkk. (2022) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip prinsip good corporate governance dan disiplin kerja, serta satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan

prinsip prinsip *good corporate Governance* dan disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Ningrum (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada. Sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ariningsih, dkk. (2023) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Rendang.

Irafah, dkk. (2020) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran internal Audit,

Kesuksesan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah *path analysis*. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Sumatera Utara.

Juliantika (2023) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, peran internal audit, fungsi badan pengawas, dan etika kepemimpinan, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Gianyar, sedangkan fungsi badan pengawas dan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Gianyar.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya, jika di bandingkan dengan penelitian Mariani, dkk. (2023), sama-sama menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, namun terdapat perbedaan antara jumlah variabel independen serta objek penelitian yang di lakukan. Pada penelitian

Ferdiana, dkk. (2024), terdapat persamaan variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen, dan laporan keuangan sebagai variabel dependen, serta teknik analisis data yang di gunakan, namun penelitian ini tidak menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit. Pada penelitian Melinda, dkk. (2021), Adrian, dkk. (2022), Ningrum (2018), dan Ariningsih, dkk. (2023), sama-sama menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan teknologi informasi sebagai variabel independen, sedangkan perbedaan penelitian ini tidak menggunakan variabel peran internal audit. Pada penelitian Irafah, dkk. (2020), dan Juliantika (2023), sama-sama menggunakan peran internal audit sebagai variabel independen, sedangkan perbedaannya pada objek penelitian yang di gunakan.

